

EFEKTIVITAS SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Annisa Amaliah Umar

NPP. 32.0884

Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0884@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Tumija, S.Pd, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the problem of frequent internet network instability, which hinders the process of village financial reporting. The Village Financial System (SISKEUDES) is used to simplify village financial management. **Purpose:** This study aims to provide an overview of the effectiveness of SISKEUDES in village financial reporting in Bone Regency. **Method:** The method used in this research is a descriptive qualitative method, employing Amas's theory from 2020. Data was collected through interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with five informants, namely the Head of the Bone Regency Community and Village Empowerment Agency (DPMD) and his staff, and the Head of Barebbo Village. **Result:** The research results indicate that SISKEUDES in Bone Regency has generally been effective in improving the efficiency of village financial reporting. SISKEUDES simplifies the report preparation process and aids in better village development planning. Factors such as the understanding and ability of SISKEUDES operators, the availability of information in the application, and the quality of reports generated by SISKEUDES are considered good. **Conclusion:** Efforts to improve effectiveness are continuously carried out through training and assistance. This study suggests that the Bone Regency Government should continue to strive to enhance the effectiveness of village financial reporting. The Bone Regency Government can optimize the operation of SISKEUDES to achieve effective village financial management.

Keywords: Effectiveness, Village Financial System, Village Financial Reporting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah jaringan internet yang sering tidak stabil sehingga menghambat proses pelaksanaan pelaporan keuangan desa. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) digunakan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas Siskeudes dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori dari Amas tahun 2020. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima informan yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone serta jajarannya dan Kepala Desa Barebbo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes di Kabupaten Bone secara

umum sudah efektif dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan desa. Siskeudes mempermudah proses penyusunan laporan, dan membantu dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Faktor-faktor seperti pemahaman dan kemampuan operator Siskeudes, ketersediaan informasi dalam aplikasi, dan kualitas laporan yang dihasilkan Siskeudes dinilai baik. **Kesimpulan:** Upaya peningkatan efektivitas terus dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Bone untuk sebaiknya tetap berupaya meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Bone dapat mengoptimalkan pengoperasian Siskeudes untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dengan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. (Wasistiono, 2003)

Sistem pemerintahan saat ini menempatkan desa pada peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan otonom kepada desa. Otonomi ini didukung dengan pemberian dana desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah. Desa memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta ketertiban dan disiplin anggaran. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang informatif bagi para pemangku kepentingan. (Tuanaya & Wance, 2024)

Pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan dengan baik, terutama dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran tersebut harus digunakan secara tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat, dan pelaporan penggunaannya adalah suatu keharusan. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas atas pemanfaatan dana, khususnya dalam bentuk laporan finansial desa. (Anggreni et al., 2020)

Pemerintah desa mendapat pendampingan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengembangkan aplikasi yang menyederhanakan tata kelola keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mulai diimplementasikan sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015. Siskeudes berperan sebagai alat bantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara komprehensif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini memfasilitasi penatausahaan keuangan desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas penggunaan anggaran desa. (Mardiana & Hartati, 2020)

Kabupaten Bone telah menerapkan Siskeudes sejak tahun 2017 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Namun, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone masih menghadapi tantangan, terutama dalam pelaporan keuangan. Jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala dalam ketepatan dan kecepatan pelaporan, yang berdampak pada pencairan anggaran desa.

Data realisasi anggaran dana desa tahun 2020-2024 menunjukkan indikasi bahwa penerapan Siskeudes belum sepenuhnya efektif dalam memastikan pelaporan keuangan sesuai dengan perencanaan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengoperasian dan pengelolaan Siskeudes secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pelaporan keuangan desa melalui Siskeudes di Kabupaten Bone.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengoperasian dan pengelolaan aplikasi Siskeudes secara umum. Belum ada penelitian yang secara khusus membahas efektivitas pengelolaan keuangan desa khususnya pada laporan keuangan desa melalui Siskeudes di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian terkait dengan efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pelaporan Keuangan Desa di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan beragam mengenai implementasi dan efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). (Martini et al., 2019) menemukan bahwa Siskeudes belum optimal dalam pengoperasiannya. Sebaliknya, (Faizah & Sari, 2022) menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes efektif dan efisien dalam membantu pemerintah desa mengelola keuangan di Desa Banyudono. (Murtiani et al., 2023) juga menyimpulkan bahwa Siskeudes efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Senada dengan temuan tersebut, (Rahmah & Hayati, 2020) menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes di Desa Kambitin sudah efektif. (Pujiani et al., 2022) juga menemukan bahwa penggunaan Siskeudes cukup efektif dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jerowaru. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, dengan beberapa penelitian menunjukkan efektivitasnya dan yang lain menyoroti tantangan dalam implementasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena secara spesifik mengeksplorasi efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus ini membedakannya dari penelitian sebelumnya yang cenderung membahas pengoperasian dan pengelolaan aplikasi Siskeudes secara umum. Selain itu, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong efektivitas Siskeudes dalam konteks pelaporan keuangan desa, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dan langkah-langkah strategis yang relevan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan Siskeudes untuk pelaporan keuangan desa yang lebih efektif.

1.5. Tujuan

Tujuan Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai faktor pendukung dan penghambat dari Efektivitas Sistem Keuangan Desa yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bone serta upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah pada Sistem Keuangan Desa untuk meningkatkan efektivitas Siskeudes.

II. METODE

Penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan atau memperoleh jawaban atas pertanyaan yang muncul melalui pendekatan

ilmiah. Proses ini melibatkan pola pikir reflektif dan logika ilmiah yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang sejalan dengan tujuan serta karakteristik dari penyelidikan tersebut (Nurdin & Hartati, 2019). Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2019), karena menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi) yang bersifat untuk memahami sebuah makna, peneliti harus melakukan kajian mendalam terhadap teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini bertujuan untuk memahami dasar teoritis dan menempatkan penelitian dalam konteks ilmiah yang lebih luas yang merupakan keunikan dari sebuah fenomena dan hipotesis yang ada pada penelitian ini (Simangunsong, 2017). Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2012). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semistruktur untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam menyampaikan informasi secara terbuka sesuai pengalaman dan pemahamannya, sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong, 2017) bahwa wawancara semistruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi yang relevan dengan pokok permasalahan. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling, Penelitian ini menggunakan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitasnya. Informan kunci meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone, jajaran staf di bawahnya, serta Kepala Desa Barebbo. Kepala DPMD dipilih karena memiliki kewenangan dalam pengawasan dan kebijakan terkait Siskeudes, sementara jajaran staf bertanggung jawab atas aspek teknis dan operasional. Kepala Desa Barebbo memberikan perspektif langsung mengenai dampak penerapan Siskeudes di tingkat desa. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas sistem dari berbagai sudut pandang guna memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pelaporan keuangan desa. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari (Moleong, 2004) yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan selama 19 hari yakni dari tanggal 6 Januari 2025 – 25 Januari 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Sistem Keuangan Desa Dalam Pelaporan Keuangan Desa

1. Kesesuaian Informasi yang diminta dalam Template/Program

Pemerintah Kabupaten Bone telah mengambil langkah progresif dengan mengadopsi Siskeudes, sebuah sistem pengelolaan keuangan desa berbasis komputer, yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan aksesibilitas informasi keuangan desa secara daring. Inisiatif ini tidak hanya mendukung transparansi tetapi juga sangat relevan dengan tugas dan fungsi utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Melalui Siskeudes, DPMD dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik unik setiap masyarakat desa serta potensi sumber daya yang mereka miliki. Lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi acuan fundamental dalam memastikan bahwa arah pembangunan desa selaras dengan kebijakan dan visi pembangunan

di tingkat kabupaten. Integrasi ini menciptakan sinergi yang kuat antara perencanaan di tingkat desa dan kabupaten, mendorong pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya efektivitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Efektivitas ini tercermin dari beberapa aspek, di antaranya adalah kesesuaian informasi yang diminta dalam template Siskeudes dengan kebutuhan pelaporan, serta pemahaman dan kemampuan operasional perangkat desa dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Data wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten Bone pada 20 Januari 2025 menegaskan bahwa informasi yang diminta dalam Siskeudes relevan dengan tugas dan fungsi DPMD, terutama dalam hal pemahaman karakteristik masyarakat desa dan potensi sumber daya yang ada. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan desa dan sinkronisasi dengan kebijakan kabupaten.

Efektivitas Siskeudes juga didukung oleh adanya upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan operasional perangkat desa. Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Bone pada 15 Januari 2025 mengungkapkan bahwa secara umum, pengetahuan dan kemampuan operasional terkait Siskeudes sudah cukup baik, terutama bagi mereka yang sering mengikuti pelatihan. Pelatihan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keahlian penggunaan aplikasi Siskeudes.

Efektivitas Siskeudes tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah masalah koneksi internet yang tidak stabil. Tantangan ini dapat menghambat proses penginputan data, pelaporan, dan akses informasi keuangan desa secara daring. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pendampingan, pembiasaan penggunaan aplikasi, dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti konektivitas internet.

Sebagai kesimpulan, Siskeudes telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tingkat pemahaman dan kemampuan operasional perangkat desa yang umumnya baik, didukung oleh format pelaporan yang sesuai standar BPKP, serta ketersediaan informasi yang memadai dalam sistem. Meskipun demikian, untuk mencapai optimalisasi penuh, penting bagi DPMD dan pihak terkait untuk terus memberikan pendampingan, mengatasi tantangan infrastruktur seperti koneksi internet, dan memastikan bahwa seluruh perangkat desa memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola keuangan desa secara akurat dan transparan.

2. Kesesuaian Jenis Laporan

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Bone menghasilkan jenis laporan yang dinilai komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Jenis laporan yang dihasilkan mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan desa, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban keuangan (termasuk laporan realisasi anggaran dan laporan kekayaan desa), laporan kegiatan, hingga laporan transfer keuangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala DPMD Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 2025, yang menyatakan bahwa jenis laporan yang dihasilkan Siskeudes saat ini sudah cukup komprehensif dan sangat membantu dalam tugas pengawasan.

Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan penting yang dibutuhkan untuk pengawasan dan transparansi keuangan desa. Ini meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri dari rancangan, peraturan desa, perubahan APBDes (jika ada), serta laporan realisasi pelaksanaan secara semesteran dan tahunan. Selain itu, ada juga laporan pertanggungjawaban keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan desa, dan catatan atas laporan keuangan. Sistem ini juga menghasilkan

laporan kegiatan yang merinci progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan yang direncanakan dalam APBDes. Terakhir, terdapat laporan transfer keuangan yang mendokumentasikan penerimaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Bone, serta bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Kesesuaian jenis laporan ini dipastikan melalui peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku, dan Kepala DPMD Kabupaten Bone menegaskan bahwa laporan yang dihasilkan Siskeudes sudah cukup komprehensif dan sangat membantu tugas pengawasan mereka. Upaya sistematis dalam memberikan bimbingan teknis Siskeudes kepada desa-desa, termasuk di Kabupaten Bone, menunjukkan komitmen terhadap pemahaman dan penggunaan fitur-fitur laporan ini.

Ketersediaan data dan laporan manual yang lengkap serta petunjuk pelaksanaan teknis yang memadai juga menjadi faktor pendukung efektivitas pelaporan keuangan desa. Sekretaris DPMD pada tanggal 14 Januari 2025 menegaskan bahwa DPMD selalu memastikan semua dokumen yang diperlukan tersedia sebelum menginput data ke dalam aplikasi Siskeudes, termasuk APBDesa, Buku Kas Umum, dan bukti pengeluaran lainnya. Hal ini membantu meminimalisir kesalahan dalam proses pelaporan.

Tabel 3.1
Jenis Laporan Sistem Keuangan Desa

No.	Jenis Laporan
1.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa
2.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahunan dan LPP Desa akhir Masa Jabatan;
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan
5.	Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)
6.	Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
7.	Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa setiap tahun

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2025

Kualitas laporan yang dihasilkan Siskeudes dinilai baik, terutama dalam hal kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan-laporan yang dihasilkan dianggap mematuhi standar akuntansi pemerintah, menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris DPMD pada 14 Januari 2025, yang menyatakan bahwa format laporan Siskeudes sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, memudahkan penyusunan laporan yang akurat, serta membantu meminimalisir risiko kesalahan atau pelanggaran. Siskeudes tidak hanya memfasilitasi penyusunan laporan yang tepat tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara keseluruhan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meminimalisir potensi penyimpangan.

1.3. Ketepatan Dan Kepastian Waktu Pelaporan

Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan adalah aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone. Aplikasi Siskeudes, dengan format laporan standar dan alur kerja terstrukturnya, memfasilitasi proses penyusunan dan pengiriman laporan sesuai jadwal yang ditetapkan. Efektivitas Siskeudes dalam hal ini dipengaruhi oleh kebijakan jadwal pelaporan pemerintah Kabupaten Bone, kapasitas sumber daya manusia di tingkat

desa, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas internet, disiplin pemerintah desa, serta dukungan teknis yang memadai. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone menegaskan bahwa Siskeudes membantu mempercepat proses laporan, meskipun faktor-faktor seperti SDM dan infrastruktur perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, DPMD secara berkelanjutan melakukan sosialisasi, pelatihan, dukungan teknis, dan monitoring untuk mengoptimalkan efektivitas Siskeudes.

Ketepatan waktu dalam proses penginputan data manual ke dalam aplikasi Siskeudes merupakan faktor krusial bagi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Kabupaten Bone menjelaskan bahwa timnya selalu berusaha menginput data sesegera mungkin setelah transaksi keuangan terjadi untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan memastikan laporan keuangan selalu terkini. Mereka memiliki jadwal rutin untuk penginputan data, didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan sumber daya yang memadai. Hal serupa juga diterapkan di Desa Barebbo, di mana Kepala Desa menekankan kepada perangkat desa, khususnya Kaur Keuangan, untuk segera memproses dan menginput data transaksi begitu bukti diterima, tanpa menunda-nunda. Mereka juga memiliki jadwal rutin penginputan data, misalnya setiap akhir minggu atau awal bulan. Bukti keberhasilan ini terlihat dari Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025, di mana semua penginputan telah selesai sebelum tanggal 19 Januari, sesuai dengan batas waktu pelaporan tahunan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (akhir Maret atau awal April tahun berikutnya). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Bone dan kerja sama dari seluruh desa dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang efektif dan tepat waktu.

1.4. Kesesuaian Persyaratan, Prosedur dan Tahapan Pelaporan

Siskeudes di Kabupaten Bone dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaporan keuangan desa dengan persyaratan, prosedur, dan tahapan yang berlaku. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan format standar untuk berbagai jenis laporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menawarkan alur kerja yang terstruktur. Alur kerja ini secara sistematis membimbing pemerintah desa melalui setiap tahapan penyusunan laporan, mulai dari penginputan data yang akurat hingga proses pengiriman laporan yang tepat waktu. Lebih dari itu, Siskeudes dilengkapi dengan fitur-fitur pengendalian internal yang canggih, yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pelaporan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Fitur-fitur ini membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan integritas data. Secara keseluruhan, Siskeudes mendukung seluruh siklus pelaporan keuangan desa dan secara efektif memfasilitasi penyusunan laporan periodik yang diperlukan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone, pada tanggal 20 Januari 2025, secara langsung menegaskan bahwa Siskeudes menyediakan format standar laporan yang sesuai peraturan dan alur kerja yang membimbing penyusunan laporan, lengkap dengan fitur pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan prosedur. Hal ini menunjukkan komitmen DPMD terhadap transparansi dan akuntabilitas. Efektivitas Siskeudes dalam menjamin kesesuaian ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan ketaatan operator di tingkat desa, ketelitian dalam penginputan data, efektivitas pengawasan internal desa, serta peran aktif pemerintah daerah dalam sosialisasi peraturan dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, Siskeudes memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang sangat efektif dalam mewujudkan pelaporan keuangan desa yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan, prosedur, dan tahapan yang berlaku, mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Bone telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menerapkan standar pelaporan keuangan desa yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pedoman BPKP merupakan acuan fundamental bagi pengelolaan keuangan desa, mencakup setiap aspek mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, hingga pelaporan keuangan yang transparan. Dalam konteks ini, Kepala DPMD Kabupaten Bone, pada tanggal 20 Januari 2025, secara eksplisit menyatakan bahwa pihaknya senantiasa menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan format dan jadwal yang ditetapkan oleh BPKP. Komitmen ini tidak berhenti pada format dan jadwal saja, tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa semua dokumen pendukung lengkap dan tersimpan dengan rapi, yang merupakan indikator penting dari tata kelola yang baik. Sekretaris DPMD, pada tanggal 14 Januari 2025, memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan bahwa mereka selalu berusaha keras untuk mengikuti pedoman BPKP dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan standar BPKP ini adalah melalui penggunaan Aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini, yang memang dikembangkan oleh BPKP sebagai langkah antisipasi terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara inheren dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan Siskeudes menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Bone tidak hanya memahami pentingnya pedoman BPKP tetapi juga mengambil tindakan proaktif untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam pelaporan keuangan desa. Ini menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tidak hanya akuntabel tetapi juga transparan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone memegang peran yang sangat sentral dalam memastikan bahwa setiap desa mematuhi syarat dan prosedur pelaporan keuangan melalui aplikasi Siskeudes. DPMD secara proaktif dan rutin menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan Siskeudes, dengan fokus utama pada para admin aplikasi di tingkat desa. Dalam setiap sesi pelatihan, DPMD secara tegas menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap syarat dan prosedur pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, peran DPMD tidak berhenti pada pelatihan. Mereka juga secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan desa. Melalui kegiatan monitoring ini, DPMD dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh desa-desa dan dengan cepat memberikan solusi yang tepat dan relevan.

Sekretaris DPMD menambahkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan terus ditingkatkan, dan mereka juga menjalin kerja sama erat dengan pihak-pihak terkait, seperti BPKP, untuk terus meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menggunakan Siskeudes. Sebuah tantangan yang sering muncul adalah perubahan peraturan yang cepat, yang dapat memengaruhi pelaksanaan Siskeudes di desa. Untuk mengatasi hal ini, DPMD secara responsif selalu mengadakan sosialisasi terkait peraturan terbaru, memastikan bahwa desa-desa selalu terinformasi dan dapat beradaptasi. Kepala Desa Barebbo, pada tanggal 17 Januari 2025, juga memberikan testimoni bahwa Siskeudes sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan. Aplikasi ini secara intuitif memandu mereka dalam setiap tahapan pelaporan dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga memanfaatkan fitur-fitur Siskeudes untuk memastikan semua data terinput dengan benar dan tidak ada kesalahan yang signifikan.

Secara keseluruhan, DPMD Kabupaten Bone telah menunjukkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dalam mendukung efektivitas Siskeudes sebagai alat penting untuk meningkatkan pelaporan keuangan desa. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul dan memastikan bahwa setiap desa dapat melaksanakan pelaporan keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.5. Umpan Balik (*Feedback*)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Bone telah mengintegrasikan sebuah proses umpan balik (*feedback*) yang komprehensif, bertujuan untuk mengevaluasi dan merespons laporan keuangan serta kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah desa melalui aplikasi tersebut. Proses umpan balik ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan melibatkan berbagai pihak kunci seperti pemerintah kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan bahkan masyarakat. Mereka semua memiliki peran dalam memberikan masukan yang relevan, yang didasarkan pada serangkaian indikator krusial. Indikator-indikator ini mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjamin konsistensi pelaporan, kecukupan pengungkapan informasi untuk transparansi yang maksimal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan legalitas, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan demi efisiensi, serta kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan untuk memastikan proses yang benar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone, dalam wawancara pada tanggal 20 Januari 2025, menjelaskan secara rinci tentang beragam bentuk umpan balik yang mereka berikan. Jika laporan sudah baik dan sesuai, DPMD memberikan apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kinerja positif. Namun, jika ada hal yang kurang jelas atau memerlukan pendalaman lebih lanjut, mereka akan mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau potensi masalah, DPMD tidak ragu untuk meminta perbaikan atau penyesuaian demi menjaga akurasi dan integritas laporan. Lebih dari itu, DPMD juga menunjukkan keterbukaan dengan menyambut rekomendasi dari BPD maupun masyarakat terkait peningkatan kualitas pelaporan di masa mendatang. Proses umpan balik yang efektif dan beragam ini diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan mereka melalui Siskeudes, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dalam tata kelola keuangan desa secara keseluruhan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan implementasi Siskeudes di Kabupaten Bone sangat ditentukan oleh tiga pilar utama: akurasi data yang diinput, kesesuaian data dengan fakta yang terjadi di lapangan, serta ketepatan waktu dan konsistensi dalam pelaporan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana data yang dimasukkan ke dalam Siskeudes benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, dan bagaimana proses pelaporan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan format dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini adalah aspek fundamental untuk memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, pada tanggal 15 Januari 2025, dengan tegas menyatakan bahwa proses pelaporan keuangan desa melalui Siskeudes berjalan sangat baik. Ia menekankan bahwa pihaknya selalu mematuhi jadwal pelaporan yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting, laporan yang masuk selalu menunjukkan konsistensi yang tinggi, baik dari segi format maupun ketentuan yang diminta oleh sistem. Komitmen ini tidak berhenti pada kepatuhan semata; DPMD juga terus melakukan peningkatan kapasitas bagi para

operator desa agar mereka dapat menginput data dengan benar dan menggunakan aplikasi Siskeudes secara optimal. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas pelaporan. Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Desa Barebbo, pada tanggal 17 Januari 2025, menambahkan bahwa desanya berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem keuangan desa. Adanya tuntutan dari pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan laporan keuangan Desa Barebbo juga menjadi motivasi kuat. Kepala Desa memahami betul bahwa konsistensi dalam pelaporan adalah kunci untuk memudahkan proses konsolidasi dan analisis data di tingkat kabupaten, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk mencapai konsistensi ini, mereka secara aktif memanfaatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak kabupaten, yang membantu mereka memahami format dan mekanisme pelaporan yang benar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa upaya pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone terus menunjukkan perbaikan dan peningkatan kualitas yang signifikan. DPMD, bersama dengan pemerintah desa, memiliki komitmen kuat untuk menyajikan laporan yang akurat, sesuai fakta, tepat waktu, dan konsisten dengan sistem yang berlaku. Namun, mereka juga menyadari bahwa masih ada tantangan yang perlu terus diatasi. Tantangan ini mencakup penguatan mekanisme verifikasi dan monitoring untuk memastikan keakuratan data, serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal untuk efisiensi dan efektivitas pelaporan di masa mendatang. Dengan demikian, proses ini adalah sebuah perjalanan berkelanjutan menuju tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone, dan menemukan bahwa secara umum sistem ini telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaporan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes terbukti memudahkan proses pencatatan, penginputan, hingga penyusunan laporan keuangan desa yang lebih sistematis dan terstruktur. Dari lima indikator efektivitas menurut Amas et al. (2020) yaitu kesesuaian informasi dalam template, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian syarat dan prosedur pelaporan, serta adanya umpan balik, hampir seluruh indikator tersebut sudah terpenuhi secara baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dan observasi, di mana operator desa menyatakan bahwa aplikasi membantu mempercepat proses penyusunan laporan, dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan format dan jenis laporan yang diminta oleh DPMD. Namun demikian, efektivitas Siskeudes belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang masih menjadi tantangan di lapangan, di antaranya, keterbatasan jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah desa menyebabkan keterlambatan proses pelaporan secara daring, kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis dari operator desa, khususnya perangkat yang belum pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan secara langsung dan feedback dari DPMD yang belum terstruktur secara rutin, sehingga desa tidak mendapatkan evaluasi berkala atas kualitas laporannya.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Indrianti et al., 2020), yang menyebutkan bahwa kurangnya penguasaan aplikasi oleh SDM serta lemahnya komitmen pemerintah kabupaten dapat menghambat optimalisasi sistem. Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Faizah & Sari, 2022), yang menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes memang membantu percepatan pelaporan, tetapi masih kerap mengalami kendala teknis seperti error sistem, terutama ketika server sedang padat atau jaringan terganggu. Dalam konteks Kabupaten Bone, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi salah satu faktor pendorong utama. Hal ini diperkuat oleh hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa DPMD telah menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala kepada operator desa. Namun, distribusi pelatihan tersebut belum merata ke seluruh desa. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan kemampuan antaroperator di desa-desa berbeda.

Temuan ini juga memperkuat penelitian (Murtiani et al., 2023) yang menyatakan bahwa efektivitas Siskeudes dapat tercapai apabila laporan yang dihasilkan sesuai template, disusun tepat waktu, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini bahkan menggarisbawahi bahwa indikator “umpan balik” memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan kualitas pelaporan di masa mendatang. Secara umum, efektivitas pelaporan keuangan desa melalui Siskeudes tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis aplikasi, tetapi juga oleh komitmen dan kesadaran pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dukungan kebijakan daerah, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan pelatihan, tersedianya infrastruktur pendukung seperti perangkat komputer dan akses internet yang memadai, kapasitas operator dan tenaga teknis lokal yang menguasai penggunaan aplikasi secara menyeluruh.

Menariknya, data realisasi anggaran dana desa dari tahun 2020 hingga 2024 juga memperlihatkan dinamika yang relevan dengan efektivitas Siskeudes. Adanya selisih antara anggaran dan realisasi, baik defisit maupun surplus, menandakan perlunya peningkatan akurasi perencanaan dan kontrol pelaksanaan anggaran, yang salah satunya bergantung pada kualitas pelaporan keuangan melalui Siskeudes. Sebagai perbandingan, penelitian oleh (Mardaw et al., 2022) yang dilakukan di Desa Grati menunjukkan bahwa efektivitas Siskeudes sangat tinggi ketika ditopang oleh SDM yang kompeten dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Kabupaten Bone, bahwa efektivitas teknologi digital seperti Siskeudes tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sistem pendukung di lapangan.

Penerapan Siskeudes di Kabupaten Bone telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pelaporan keuangan desa. Namun, keberhasilan ini masih bersifat parsial dan belum merata ke seluruh desa. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, diperlukan upaya kolaboratif antara DPMD, pemerintah desa, dan stakeholder terkait dalam memperkuat SDM, infrastruktur, dan sistem evaluasi pelaporan keuangan berbasis digital.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan aplikasi Siskeudes di Kabupaten Bone masih belum dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh perangkat desa. Banyak operator desa hanya menggunakan fitur dasar seperti input anggaran dan pencetakan laporan tanpa mengeksplorasi fitur lanjutan seperti monitoring realisasi anggaran secara berkala atau pelaporan otomatis. Penggunaan terbatas ini menunjukkan bahwa potensi penuh dari aplikasi belum dimaksimalkan dan masih memerlukan peningkatan kapasitas teknis.

Perangkat desa menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap satu atau dua orang operator yang menguasai aplikasi. Ketika operator tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya, proses pelaporan keuangan menjadi terhambat bahkan tertunda. Situasi ini memperlihatkan belum adanya alih pengetahuan yang baik serta tidak adanya sistem rotasi atau pelatihan internal antarperangkat desa untuk memastikan kesinambungan pelaporan. Terdapat kecenderungan rasa takut dari beberapa perangkat desa untuk menjalankan aplikasi secara mandiri. Mereka khawatir melakukan kesalahan yang dapat berdampak pada hasil audit atau pemeriksaan dari pihak eksternal. Kekhawatiran ini menyebabkan proses pelaporan lebih lambat karena menunggu pendampingan dari pihak

DPMD. Kondisi ini menjadi indikator bahwa pemahaman teknis saja tidak cukup, tetapi perlu ditanamkan rasa percaya diri dan keberanian untuk mencoba serta belajar dari kesalahan.

Kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan yang akuntabel mulai tumbuh di kalangan pemerintah desa. Beberapa kepala desa dan operator dengan inisiatif sendiri mulai berkonsultasi ke DPMD sebelum batas waktu pelaporan tiba. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari pelaporan sebagai kewajiban administratif menjadi bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi publik yang harus dipenuhi.

Aplikasi Siskeudes secara tidak langsung memberi dampak positif terhadap perencanaan pembangunan desa. Data keuangan yang tersusun lebih tertib digunakan sebagai dasar dalam menyusun program desa tahun berikutnya. Beberapa desa menyatakan bahwa laporan keuangan yang tersaji lebih cepat membuat mereka lebih siap dalam menyusun anggaran berbasis data, bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau asumsi.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas Siskeudes dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone secara umum telah tercapai berdasarkan lima dimensi penilaian, meskipun masih terdapat kendala pada akses jaringan internet. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan SDM, kurangnya dukungan teknis, dan gangguan konektivitas, sedangkan faktor pendorongnya adalah kesadaran internal, kemudahan penggunaan sistem, dan dukungan teknis yang konsisten. DPMD telah melakukan upaya peningkatan efektivitas melalui pelatihan operator, peningkatan koordinasi, serta penguatan kepatuhan terhadap pedoman pelaporan keuangan dari BPKP.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan studi selanjutnya. Pertama, cakupan penelitian terbatas pada wilayah Kabupaten Bone dengan jumlah informan yang relatif sedikit, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan ke seluruh desa di wilayah lain yang memiliki kondisi geografis, infrastruktur, dan sumber daya yang berbeda. Kedua, data yang diperoleh bersifat kualitatif dan bergantung pada hasil wawancara serta observasi, yang sangat dipengaruhi oleh subjektivitas informan dan peneliti. Ketiga, keterbatasan waktu penelitian juga membatasi pengamatan terhadap dinamika pelaksanaan Siskeudes dalam jangka panjang, termasuk efek berkelanjutan dari pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh DPMD.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian dapat difokuskan pada pengembangan studi komparatif antarwilayah untuk melihat variasi efektivitas implementasi Siskeudes di berbagai kondisi geografis dan sosial. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai desa guna memperkuat validitas data. Selain itu, disarankan untuk meneliti dampak langsung penggunaan Siskeudes terhadap kualitas pembangunan desa dan pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali strategi digitalisasi yang adaptif di daerah dengan keterbatasan infrastruktur serta merancang model pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi operator desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, N. M. M., Ariyanto, D., Suprasto, H. B., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Successful adoption of the village's financial system. *Accounting*, 6(6), 1129–1138. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.005>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron. *Jurnal Eprints.Uniska*, 5(1), 1–10.
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumberduko Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmiah Jurnal E-Jra*, 11(8), 39–46.
- Mardiana, & Hartati, E. (2020). User Satisfaction Level on Implementation of SISKEUDES Application. *Journal of Physics: Conference Series*, 1500(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1500/1/012102>
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69–74.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtiani, M., Handajani, L., & Waksito, I. (2023). Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *UMMagelang Conference Series*, 931–947.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Surabaya.
- Pujiani, E. S., L. B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis efektifitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) Dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal risma*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>
- Rahmah, M., & Hayati, R. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB (Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis)*, 3(2), 1167–1179.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tuanaya, W., & Wance, M. (2024). Digital transformation of financial transactions of Mamala Negeri government to support the inclusion of village finance information system. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–19. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6354>
- Wasistiono, S. S. (2003). *Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Fokus Media.